

IDENTITAS AGAMA ISLAM YANG MODERAT DI INDONESIA SEBAGAI BAGIAN DARI PENGUATAN IDENTITAS NASIONAL

Agus Satmoko Adi,

Universitas Negeri Surabaya, agussatmoko@unesa.ac.id

Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba

Universitas Negeri Surabaya, imanpurba@unesa.ac.id

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk. Dihuni beragam ras, suku, etnik, tradisi, budaya, dan agama. Dalam realitas majemuk itulah, agama Islam berkembang menjadi mayoritas agama yang dipeluk oleh warga negara Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang mayoritas warga negaranya sebagai muslim yang berkarakter demokratis, damai, dan berkeadaban. Hal tersebut tidak lepas dari peranan organisasi massa Islam, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah memiliki peran penting dalam pembangunan demokrasi dan perdamaian di Indonesia. Hal itu bisa dilakukan karena kedua organisasi tersebut yang moderat dan telah berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka, sehingga pada akhirnya menjadi identitas, karakter dan personifikasi wajah Islam Indonesia. Karakter moderat bagi Islam Indonesia itu dapat dipertahankan dewasa ini karena penyemaian dan penguatan Islam moderat melalui jalur pendidikan, baik secara formal, informal dan nonformal, baik oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat.

Kata kunci: Identitas, Islam, moderat.

Abstract

Indonesia is a very diverse country. Inhabited by various races, ethnicities, traditions, cultures and religions. In this pluralistic reality, Islam has developed into the majority of religions that are embraced by Indonesian citizens. Indonesia is known as a country where the majority of its citizens are Muslims who have democratic, peaceful and civilized characteristics. This cannot be separated from the role of Islamic mass organizations, such as Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah. NU and Muhammadiyah have an important role in the development of democracy and peace in Indonesia. This can be done because the two organizations are moderate and have existed long before Indonesia's independence, so that in the end they become the identity, character and personification of the face of Indonesian Islam. The moderate character for Indonesian Islam can be maintained today because of the seeding and strengthening of moderate Islam through education, both formally, informally and non-formally, by both the government and non-governmental organizations.

Keywords: identity, Islam, moderate.

PENDAHULUAN

Identitas memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional atau Nasionalisme memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam

Simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, Bendera Merah Putih, Bahasa Nasional yaitu Bahasa Indonesia, Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dengan terwujudnya identitas bersama sebagai bangsa dan negara Indonesia dapat mengikat eksistensinya serta memberikan daya hidup. Sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat dalam hubungan internasional akan dihargai dan sejajar dengan bangsa dan negara lain. Identitas bersama itu juga dapat menunjukkan jatidiri serta kepribadiannya. Rasa solidaritas sosial, kebersamaan sebagai kelompok dapat mendukung upaya mengisi kemerdekaan. Dengan identitas bersama itu juga dapat memberikan motivasi untuk mencapai kejayaan bangsa dan negara di masa depan.

Ciri khas suatu bangsa yang merupakan *local genius* dalam menghadapi pengaruh budaya asing akan menghadapi *challenge* dan *response*. Jika *challenge* cukup besar sementara *response* kecil, maka bangsa tersebut akan punah dan hal ini sebagaimana terjadi pada bangsa Aborigin di Australia dan bangsa Indian di Amerika. Namun demikian, jika *challenge* kecil sementara *response* besar maka bangsa tersebut tidak akan berkembang menjadi bangsa yang kreatif.

Oleh karena itu, agar bangsa Indonesia tetap eksis terutama saat ini yaitu dalam menghadapi globalisasi, maka harus tetap meletakkan jati diri dan identitas nasional yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia sebagai dasar pengembangan kreatifitas budaya globalisasi. Sebagaimana terjadi di berbagai negara di dunia, justru dalam era globalisasi dengan penuh tantangan yang cenderung menghancurkan nasionalisme, muncullah kebangkitan kembali kesadaran nasional.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian tanpa menggunakan angka statistik tetapi dengan pemaparan secara deskriptif yaitu berusaha memaparkan suatu gejala atau peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini, dimana peneliti berusaha memotret sebuah peristiwa dan kejadian yang menjadi focus perhatian untuk kemudian dijabarkan sebagaimana adanya. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus untuk melihat fenomena-fenomena sosial yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori identitas sosial yang dikemukakan oleh Tajfel dan Turner pada tahun 1979 merupakan salah satu teori psikologi yang sangat berpengaruh. Teori ini menyatakan bahwa individu mendefinisikan dirinya dalam konsep diri sosial (identitas sosial), dengan mengkategorisasikan diri sendiri dan orang lain sebagai bagian dari kelompok sosial. (Huddy, 2003: 23)

Keanggotaan individu dalam suatu kelompok akan mengarahkan individu pada level kelompok, yang mengatur anggotanya untuk menyetujui dan mematuhi norma kelompok. Dalam konteks ini, kelompok mendefinisikan realitas sosial untuk mempermudah perkembangan identitas sosial dan mengembangkan perasaan yang kuat terhadap kelompok internal. (Bertrand, 2004; 4).

Kelompok yang menjadi referensi bagi identitas individu merupakan tempat dimana komitmen individu terhadap kelompok menguat dan menjadi bagian dari identitas dirinya. Individu mengambil karakteristik kelompok dan menjadi bagian dari diri. (Rogers, 2003: 9). Kelompok referensi ini memberi anggotanya suatu lokus identifikasi, dimana seorang individu dapat beralih dari identitas personal ke identitas sosial dan disebut sebagai *in-group*. Keanggotaan kelompok mendorong kerjasama di dalam kelompok dan konflik terhadap kelompok lain.

Hal ini merupakan dampak dari identifikasi yang intensif akan membentuk komitmen, integritas dan

kohesifitas kelompok serta memunculkan perasaan positif tentang *in-group* (*in-group favoritism*) dan memunculkan sikap merendahkan *out-group* (*out-group derogation*).

Sikap positif terhadap *in-group* dan sikap negatif terhadap *out-group* ini, akan menghasilkan identitas sosial yang memuaskan dan sebaliknya. Keanggotaan individu dalam kelompok yang berstatus lebih tinggi sangat diinginkan, karena menyebabkan identitas sosial dan identitas diri yang positif. Sebaliknya keanggotaan kelompok yang berstatus rendah tidak diinginkan, karena akan mempengaruhi konsep diri negatif anggota kelompok. (Charles dan Bernadette, 2009: 19)

Keberhasilan dan kegagalan suatu kelompok juga menjadi keberhasilan dan kegagalan anggotanya. Oleh karena itu, identitas sosial cenderung ditingkatkan dengan cara membandingkan *in-group* dengan *out-group* untuk membangun nilai positif yang membedakan dari kelompok lain, sehingga individu lebih kelompok sendiri atau kelompok sendiri lebih baik.

Hipotesis identitas sosial tentang perasaan positif tentang *in-group* dan sikap merendahkan *out-group* ini, dapat menjelaskan munculnya berbagai prasangka dan konflik di Indonesia baik yang berlatar identitas nasional, etnis maupun agama. Penelitian Tumanggor, Aripin dan Soeyoeti (2011: 11) pada lima wilayah konflik Indonesia yakni Sambas (Kalimantan Barat), Sampit (Kalimantan Tengah), Poso (Sulawesi Tengah). Ambon (Maluku Selatan) dan Ternate (Maluku Utara) menunjukkan identitas etnis/agama sebagai penyebab konflik. Perbuatan atau sikap kelompok identitas (etnis/agama) tertentu yang menyinggung harga diri dan rasa keadilan kelompok etnis/agama (26,4%), penghinaan atas keyakinan/agama (19,4%) dan suku tertentu (16,5%). Faktor penyebab lain yakni penguasaan lapangan kerja (15,6%).

Sementara konflik berlatar identitas etnis dan agama terjadi di beberapa wilayah Indonesia di antaranya Sambas dan Sampit di Kalimantan. Konflik antara etnis Dayak dan Madura ini menimbulkan ketegangan dan kekerasan massal. Begitu pula konflik di Ambon, Ternate, dan Poso. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa identitas agama mendorong keterlibatan kelompok laskar jihad dalam konflik berlatar agama di Ambon (Hasan, 2008: 1) dan mendukung kekerasan suci pada kelompok fundamentalisme Islam. (Chusniyah, 2006: 2)

Sebagaimana yang disampaikan oleh Burris dan Jackson (2000, 39), agama seperti juga gender, etnisitas dan nasionalitas merupakan suatu pembahasan utama dalam teori kategorisasi sosial dan menjadi bagian integral seorang individu. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta kehidupan multikulturalisme di Indonesia, maka identitas nasional, etnis dan agama memainkan peran yang sangat penting. Ketiga identitas ini mengikat suatu masyarakat dan 'mengeluarkan' masyarakat lain sebagai landasan nasionalitas. Karena setiap individu merupakan anggota dari suatu bangsa dan mereka tinggal dalam satu negara. Sedangkan bangsa merupakan komunitas warga negara yang memiliki karakteristik umum yang akan membedakan mereka dari komunitas lainnya.

Jelaslah bahwa identitas nasional merupakan identifikasi psikologis individu atau masyarakat terhadap beberapa karakteristik yang signifikan dalam berbagi kehidupan bersama yang menunjukkan keterkaitan mereka dengan konstitusional politik dan delegasi kekuasaan dalam suatu

negara. Sehingga identitas nasional ini dapat menjadi perekat berbagai identitas lokal yang ada dalam suatu negara, seperti gender, etnis, agama maupun lainnya. Masyarakat di suatu negara dituntut untuk menunjukkan keberagaman dalam bangunan negara yang luas yaitu didorong untuk memiliki identitas etnis. Namun pada saat yang sama, masyarakat didorong untuk menunjukkan kesatuan, koherensi dan identitas sebagai bagian dari suatu negara dan didorong untuk memiliki identitas nasional.

Identitas Agama Islam di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk. Dihuni beragam ras, suku, etnik, tradisi, budaya, dan agama. Dalam realitas majemuk itulah, agama Islam berkembang menjadi mayoritas agama yang dipeluk oleh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, timbulnya konsepsi Islam tentang pluralitas adalah hal yang sangat wajar dan sangat perlu dipertimbangkan dengan sangat baik, dalam memetakan banyaknya konflik etno religius yang terjadi di Indonesia.

Naasnya, persoalan yang paling rumit dalam diskursus keislaman saat ini adalah terkait bagaimana menerapkan konsep pluralitas sebagai bagian dari nilai-nilai ajaran Islam di ruang publik. Khususnya adalah relasi antara Islam dengan negara-bangsa (*nation-state*). Bagi ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah sebenarnya persoalan konsep negara-bangsa sudah tuntas dengan diakuinya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.

Sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, agama menjadi salah satu modal sosial bagi perkembangan dalam masyarakatnya. Dalam hal ini, semua masyarakat memerlukan suatu gabungan yang terdiri dari sistem ajaran dan simbol, norma-norma, dan nilai-nilai sebagai identitas nasional yang berperan sebagai agama civil baru bagi masyarakat modern. Agama tidak lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang irasional, intoleran, dan kaku. Agama sebagai fakta sosial yang tumbuh di masyarakat dapat memengaruhi perkembangannya. Agama yang bersifat formalistik bertransformasi menjadi *civil religion* yang lebih menghargai pluralitas, egalitarian, dan liberal sebagaimana paradigma *civil society* yang menopang proses demokratisasi dalam sistem politik.

Indonesia dikenal sebagai negara yang mayoritas warga negaranya sebagai muslim yang berkarakter demokratis, damai, dan berkeadaban. Hal tersebut tidak lepas dari peranan organisasi massa Islam, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah memiliki peran penting dalam pembangunan demokrasi dan perdamaian di Indonesia. Tak hanya itu, keduanya juga terlibat aktif dalam membangun perdamaian di dunia.

Islam di Indonesia telah memperkuat dirinya dalam proses sejarah yang sangat panjang. Paling tidak ada empat teori yang berbicara tentang proses masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori Arab, teori India, teori Iran, dan teori Cina. (Huda, 2007: 37-43). Secara keseluruhan, proses historis ini dilakukan dengan damai, yang berbeda dengan Islamisasi di kawasan lain di belahan dunia Islam.

Proses Islamisasi dengan damai itu segera berubah ketika Indonesia memasuki era reformasi 1998. Menurut catatan Tim PUSHAM UII (2009: 38), akhir masa Orde Baru merupakan momentum penting bagi kebangkitan Islam di Indonesia, yang menjadi prakondisi bagi

munculnya berbagai kelompok gerakan Islam “baru”, termasuk gerakan Islam radikal. Dalam atmosfer kebebasan inilah bermunculan aktor gerakan Islam baru, yang berada di luar kerangka *mainstream* Islam Indonesia yang dominan, semisal NU, Muhammadiyah, Persis, al-Irsyad, al-Wasliyah, Jamiat Khair dan sebagainya.

Organisasi-organisasi semisal Gerakan Tarbiyah (yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad dan sebagainya merupakan representasi generasi baru gerakan Islam di Indonesia itu. Oleh Ahmad Syafi'i Mufid beberapa gerakan yang berada di luar *mainstream* Islam Indonesia itu disebut sebagai gerakan transnasional, yaitu kelompok keagamaan yang memiliki jaringan internasional, yang datang ke suatu negara dengan membawa paham keagamaan (ideologi) baru dari negeri seberang (Timur Tengah), yang dinilai berbeda dari paham keagamaan lokal yang lebih dahulu eksis.

Beberapa kelompok keagamaan Islam atau gerakan yang dianggap transnasional adalah al-Ikhwân al-Muslimûn (Gerakan Tarbiyah) dari Mesir, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dari Libanon (Timur Tengah), Salafi dari Saudi Arabia, Shi'ah dari Iran dan Jamaah Tabligh dari India/Bangladesh.

Keenam gerakan atau kelompok keagamaan Islam tersebut, saat ini sudah ada di Indonesia, berupaya menancapkan pahamnya melalui lembaga pesantren, perguruan tinggi atau kampus-kampus, majelis-majelis ta'lim, lembaga-lembaga amil zakat, infak, dan sedekah. Karena mereka membawa paham keagamaan (ideologi) baru, maka dalam perkembangannya, acap kali mereka menimbulkan gesekan dengan beberapa kelompok keagamaan Islam yang telah lebih dahulu ada. (Mufid, 2011, 215-216).

Disadari atau tidak, para aktivis gerakan tersebut berhasil menakhodai aktivitas beberapa masjid, terutama di wilayah perkotaan. Akan tetapi, di beberapa tempat muncul kasus berupa letupan reaksi masyarakat terhadap eksistensi mereka, disebabkan cara pandang yang berbeda dalam memahami dakwah. (Mufid, 2011, 9). Sejak itu, berbagai peristiwa yang disebut radikalisme dan terorisme sering menghantui Indonesia, mulai Bom Bali dan bom-bom lainnya di berbagai wilayah Indonesia.

Secara khusus, Azyumardi Azra, (2003: 45) memandang Islam Indonesia sebagai “*Islam with a smiling face*” yang penuh damai dan moderat, sehingga tidak ada masalah dengan modernitas, demokrasi, HAM dan kecenderungan-kecenderungan lain di dunia modern. Akan tetapi, apakah karakter moderat bagi Islam Indonesia itu dapat dipertahankan dewasa ini? Ini semua tergantung kepada pemeluk agama ini. Di sinilah perlunya penyemaian dan penguatan Islam moderat melalui jalur pendidikan, baik secara formal, informal dan nonformal, baik oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Muhammadiyah dan NU yang sejak awal dicap sebagai pengusung Islam moderat, diharapkan memiliki andil besar bagi pemberdayaan Islam moderat bagi Indonesia.

Ini menyangkut pembangunan idiologi keagamaan yang harus dirujuk pada kebangsaan dan keindonesiaan. Bagaimana pemaknaan idiologi dan bagaimana pula pembentukannya? Menurut M. Sastrapratedja, ideologi secara umum dapat diartikan sebagai seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang terorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. (Sastrapratedja, 1991: 142).

Sementara Richard Pratte (1977: 26) menyebut ideologi

sebagai “*a belief system*” yang berhubungan dengan “*action*”. Dengan ini, ideologi memiliki tiga unsur. Pertama, adanya suatu penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan masa lalu yang diimajinasikan ke masa depan. Kedua, setiap ideologi memuat seperangkat nilai-nilai atau suatu preskripsi moral yang menolak sistem lainnya. Ketiga, ideologi memuat suatu orientasi pada tindakan, yaitu sebagai suatu pedoman untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat di dalamnya.

Melalui ketiga unsur tersebut, ideologi berfungsi sebagai pemersatu di antara in group (kita) dan pembeda dengan out group (mereka), karenanya ideologi dapat membentuk identitas kelompok atau bangsa. Ideologi juga berfungsi sebagai futuristik karena memberikan gambaran masa depan yang utopis, di samping juga berfungsi sebagai orientasi pada tindakan. (Sastrapratedja, 1991: 143-144).

NU maupun Muhammadiyah merupakan organisasi sipil bercorak keagamaan (Islam) yang tidak memiliki hubungan struktural secara langsung dengan negara atau lembaga-lembaga pemerintahan. Namun, eksistensi NU dan Muhammadiyah telah ada sebelum bangsa ini menjadi negara yang berdaulat pada 1945. NU didirikan 1926 dan Muhammadiyah lebih awal lagi, yaitu di 1912. Sejak awal berdiri, NU dan Muhammadiyah memiliki perhatian yang sangat serius terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia.

Itulah sebabnya, hingga kini NU dan Muhammadiyah memiliki aset ribuan lembaga pendidikan, dari tingkat paling dasar (PAUD) sampai perguruan tinggi (PT). NU dikenal memiliki jaringan lembaga pendidikan pesantren yang sangat luas, begitu pula dengan Muhammadiyah dikenal karena jumlah aset lembaga pendidikan formalnya yang juga banyak. NU dan Muhammadiyah, dengan demikian, tidak diragukan lagi telah nyata membantu dan meringankan tugas negara, yang jika bidang pendidikan sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah, pasti kewalahan dan tidak akan mampu menjalankannya secara maksimal.

NU memiliki karakter khasnya sendiri. Dengan pola yang bersifat kultural membuat karakter yang lebih plural dan toleran. Hal ini menjadi modal dasar untuk membangun civil religion yang mendukung penguatan demokrasi Indonesia. Pada konteks inilah, NU dan Muhammadiyah sebagai bagian dari *civil society* ikut menyaksikan tumbuh berkembang serta penguatan identitas nasional di Indonesia.

Terutama NU, yang sepanjang sejarah perjuangannya tidak mau diombang-ambingkan oleh praktik-praktik politik yang dilakukan oleh penganut faham barat ataupun penganut faham timur. NU sebagai penganut faham Ahlus Sunnah Wal Jamaah telah mempunyai pedoman berpolitik sendiri, yang ciri-cirinya yang paling menonjol ditandai dengan sikap dan pendirian I'tidal dan Tawassut (jalan tengah) diantara dua ujung yang ekstrim. NU meletakkan titik berat perjuangannya atas dasar pengertian menciptakan ketertiban masyarakat dan ketertiban negara secara keseluruhan. Sehingga dengan demikian terciptalah masyarakat yang aman berkeadilan dan tenang berkemakmuran.

Tujuan dan titik berat perjuangan NU tersebut sudah dibuktikan ketika merumuskan ideologi negara dan dasar negara dari suatu Negara Indonesia yang akan

dimerdekakan. Dimulai dalam sidang BPUPK pertama dan kedua, kemudian dibentuk Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta di tahun 1945, yang mana wakil wakil NU dan Muhammadiyah ada di dalamnya. Dalam Piagam Jakarta itu termaktub Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya.

Dua hari setelah Jepang menyerah, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945 malam, pada hari dikumandangkan Proklamasi Kemerdekaan oleh Soekarno Hatta, Mohammad Hatta menerima kunjungan seorang Perwira Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang menyampaikan keberatan-keberatan penduduk dari Indonesia Timur, yang mayoritas tidak beragama Islam, mengenai dimuatnya Piagam Jakarta pada Mukaddimah Undang Undang Dasar. Bila tidak diubah, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia (Noer, 1990: 255).

Keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, Mohammad Hatta memanggil empat anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang mewakili kelompok Islam, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Teuku Muhammad Hasan, dan Wahid Hasyim. Demi menjaga keutuhan bangsa pada saat saat genting ini, mereka setuju untuk menghapuskan rujukan pada agama Islam yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam teks Mukaddimah Undang Undang Dasar. Sebagai gantinya, Wahid Hasyim mengusulkan agar tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kasman, Wahid Hasyimlah yang berusaha meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo agar bersedia menerima perubahan itu. (Noer, 1990: 255). Dengan demikian, Indonesia tidak menjadi Negara Islam, namun menjadi Negara yang berdasarkan Ketuhanan.

Perselisihan yang berkepanjangan ini menunjukkan kerelaan dan kesepakatan tanggal 18 Agustus 1945, mempunyai arti simbolis yang penting. NU dan Muhammadiyah menduduki posisi yang penting dan menentukan dalam perdebatan mengenai bentuk negara Indonesia. Ormas ini bersedia mencari jalan keluar dengan agama lainnya demi persatuan bangsa. Wahid Hasyim dan Ki Bagus Hadikusumo sangat menginginkan adanya persatuan

Berangkat dari perjuangan bersejarah dalam membentuk Ideologi Negara dan Dasar Negara Indonesia seperti itulah, NU dan Muhammadiyah menjadi salah dua garda terdepan Ormas Islam di Indonesia yang selalu mengawal tegaknya dan terciptanya persatuan Indonesia. Hal itu diwujudkan dalam setiap gerak dan kerja kedua organisasi tersebut dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan. Karena itu Negara juga punya kewajiban menjaga dan merawat NU dan Muhammadiyah agar identitas Islam Indonesia yang moderat dan konservatif tetap mewarnai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berideologi Pancasila, yang berBhineka Tunggal Ika, dan berkonstitusi UUD NRI 1945.

PENUTUP

Simpulan

Identitas memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Indonesia yang majemuk etnik, bahasa, budaya, dan agamanya, memiliki identitas yang berbeda dengan bangsa lain. Identitas kehidupan umat beragama di Indonesia religius dan toleran di antara berbagai macam agama dan raturan

aliran kepercayaan, juga menjadi ciri pembeda dengan identitas keagamaan di negara lain. NU dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi terbesar di Indonesia, juga Persis, Al Irsyad, menjadi penopang kehidupan beragama yang toleran dan rahmatan lil alamin.

Saran

Di tengah berbagai ancaman terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berideologi Pancasila, dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, dari berbagai kelompok dan organisasi keagamaan yang radikal-fundamentalis, Pemerintah dan Negara perlu untuk terus menerus melakukan deradikalisasi dan menguatkan Muhammadiyah dan NU sehingga identitas Islam Indonesia yang moderat dan rahmatan lil alamin tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Syafi'i Mufid (ed.), *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Jakarta, 2011

Azra, Azyumardi, 2003, "Bali and Southeast Asian Islam: Debunking the Myths" dalam Kumar Ramakrishna dan See Seng Tan (eds.), *After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia* (Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.

Baugnet, L., Fouquet, A. (2008) Being worried and threaten doesn't lead to action, to be interested does... . 9th *International Conference on Social Representations, Bali, Indonesia, 30 Juni-5 Juli 2008*

Bertrand, Jacques (2004). *Nationalism and ethnic conflict in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.

Burris, Christopher T. & Jackson, Lynne M. (2000) Social identity and the true believer: responses to threatened self-stereotypes among the intrinsically religious. *British Journal of Social Psychology* (2000), 39, 257±278.

Chusniyah, Tutut, 2006. Ideologi, mortality salience dan kekerasan suci: Analisis model struktural. *Insan: Media psikologi*. Vol. 8, No. 2.

Hasan, Noorhaidi, 2008, *Lasykar Jihad: Islam, militansi dan pencarian Identitas di Indonesia paska Orde Baru*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia & KITLV-Jakarta.

Huddy, Leonie, 2003, Group identity and political cohesion. In In Sears, David O., Huddy, Leonie., Jervis, Robert (Ed) (2003). *Oxford handbook of political psychology*. New York: Oxford University Press.

Ichilov, Orit, 2003, Education and democratic citizenship in a changing world. In Sears, David O., Huddy, Leonie., Jervis, Robert (Ed) (2003). *Oxford handbook of political psychology*. New York: Oxford University Press.

Judd, Charles M. & Park, Bernadette, 2009, *Diverging*

Ideological viewpoint on pathways to more harmonious intergroup relations. Dalam *The political psychology of democratic citizenship*. Edited by Borgida, E.; Federico, C. M. & Sullivan, J. (2009) New York; Oxford University Press.

M. Sastrapratedja, 1991, "Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Budaya", dalam Oetoyo Oesman dan Alfian (eds.), *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jakarta: BP-7 Pusat, Jakarta*.

Nor Huda, 2007, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Richard Pratte, 1977, *Ideology and Education*, New York: David McKay Company.

Rogers, Wendy Stainton (2003) *Social psychology: experimental and critical approaches*. Philadelphia: Open University Press.

Tumanggor, R., Aripin, J., Soeyoeti, I. (2011) Dinamika konflik etnis dan agama di lima wilayah konflik Indonesia. <http://www.depsos.go.id/Balatbang/Puslitbang%20UKS/PDF/rusmin.pdf>.

Verkuyten, Maykel & Brug, Peary (2004) Multiculturalism and group status: The role of ethnic identification, group essentialism and protestant ethic. *European Journal of Social Psychology Eur. J. Soc. Psychol.* 34, 647–661 (2004).